



**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
PROVINSI MALUKU**



**RENCANA
KERJA**



2
0
2
6

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang – Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN) dan Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan setiap daerah harus menyusun rencana pembangunan daerah secara sistematis, terarah, terpadu, menyeluruh dan tanggap terhadap perubahan, dengan jenjang perencanaan yaitu perencanaan jangka panjang, perencanaan jangka menengah maupun perencanaan tahunan. Selanjutnya dalam Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 yang pedoman pelaksanaannya diatur pada Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 yang diperbaharui dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 menjelaskan langkah – langkah dalam penyusunan produk perencanaan pembangunan yang mencakup Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra Perangkat Daerah), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Kebijakan Umum Anggaran/Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA/PPAS) serta Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renja Perangkat Daerah).

Secara hierarki penyusunan Renja Perangkat Daerah merupakan produk dasar bagi penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan penjabaran dari RPJMD, diserasikan dengan Renstra Perangkat Daerah dan Rencana Kerja K/L serta menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Anggaran Pembangunan Belanja Daerah (RAPBD). Sebagai dokumen perencanaan daerah, Renja Perangkat Daerah

mempunyai kedudukan yang strategis, yaitu menjembatani antara perencanaan strategis jangka menengah dengan perencanaan dan penganggaran tahunan serta merupakan alat untuk monitoring dan evaluasi kinerja yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.

Berdasarkan pertimbangan akhir masa berlaku RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2019 – 2024 dan tahun akhir pelaksanaan RPJPD Provinsi Maluku Tahun 2005 – 2025, maka Renja Perangkat Daerah lingkup Provinsi Maluku disusun berdasarkan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025 – 2026 yang mengacu pada Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2026 sebagaimana Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024 serta Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku memiliki tugas pokok dan fungsi dalam melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup. Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku telah melakukan berbagai upaya perlindungan dan pengendalian lingkungan hidup yang dilakukan setiap tahunnya secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana tertuang di dalam Renstra serta dijabarkan dalam Renja yang bertujuan untuk melakukan perencanaan, penataan dan pengendalian lingkungan sehingga pengelolaannya sejalan dengan pelestarian lingkungan.

1.2. Landasan Hukum

Penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 dilakukan dengan mempedomani ketentuan peraturan perundang – undangan yang berlaku sebagai berikut :

1. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
3. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang – Undang Nomor 13 Tahun 2023 tentang Provinsi Maluku;
5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Program;
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

9. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2023 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Periode Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Berakhir Pada Tahun 2024;
10. Peraturan Daerah Provinsi Maluku Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Maluku;
11. Peraturan Gubernur Maluku nomor 100 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku.

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1. Maksud

Maksud penyusunan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah sebagai pedoman penyusunan rencana kerja dan anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah bidang Lingkungan Hidup yang selanjutnya ditetapkan dalam dokumen Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026.

1.3.2. Tujuan

Tujuan penyusunan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah:

- a. Untuk menentukan program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas bidang urusan

Lingkungan Hidup yang akan dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada tahun 2026;

- b. Sebagai pedoman dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2026 yang berdasarkan pada anggaran berbasis kinerja guna mewujudkan sinergitas antara tujuan dan sasaran kinerja dinas dengan tujuan dan sasaran rencana pembangunan Provinsi Maluku;
- c. Sebagai acuan dalam melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan bidang urusan Lingkungan Hidup yang dilaksanakan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan Dokumen Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I Pendahuluan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

Bab II Hasil Evaluasi Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2024

- 2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
- 2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
- 2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
- 2.4. Review Terhadap Rancangan Awal RKPD
- 2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Bab III Tujuan dan Sasaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

- 3.1. Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional
- 3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku
- 3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Bab IV Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Bab V Penutup

BAB II

HASIL EVALUASI RENJA DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

TAHUN 2024

2.1. Evaluasi Pelaksanaan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2024 dan Capaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Kegiatan evaluasi hasil pelaksanaan Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku ditujukan untuk mengidentifikasi kemampuan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatannya, mengidentifikasi realisasi capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta hambatan dan permasalahan yang terjadi.

Tercapai dan tidak tercapainya pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah disusun dapat dilihat dari laporan kinerja dan laporan keuangan. Laporan kinerja merupakan ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas dan lengkap tentang capaian kinerja yang disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.

Adapun penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026, memperhatikan beberapa unsur pokok yang merupakan dasar evaluasi pada masa mendatang, sebagai berikut:

- a. Masalah yang dihadapi dan sumber daya yang akan digunakan serta pengalokasiannya;
- b. Tujuan yang dikehendaki; dan
- c. Sasaran dan prioritas untuk mewujudkannya.

Selain hal terurai di atas, penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Tahun 2026 juga memperhatikan hal sebagai berikut :

- a. Hasil evaluasi capaian kinerja tahun 2024 sebagai *entry point* dalam penyusunan perencanaan tahun 2026; dan
- b. Memperhatikan keberlanjutan pembangunan (*sustainable development*) untuk menjaga stabilitas dan konsistensi pembangunan.

Alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA Tahun 2024 adalah Rp. 8.276.761.551,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 8.276.761.551,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 0,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 7 (tujuh) program, 12 (dua belas) kegiatan dan 22 (dua puluh dua) sub kegiatan.

Sedangkan alokasi anggaran Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menurut DPPA Tahun 2023 adalah Rp. 11.397.784.045,- yang terdiri dari anggaran belanja operasi sebesar Rp. 9.562.243.440,- dan anggaran belanja modal sebesar Rp. 1.835.540.605,-. Anggaran tersebut dialokasikan untuk mendanai pelaksanaan 8 (delapan) program, 13 (tiga belas) kegiatan dan 25 (dua puluh lima) sub kegiatan.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2025 dijabarkan pada Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

**Tabel 1. (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja Perangkat Daerah dan Pencapaian Renstra Perangkat Daerah s.d. Tahun 2025 (Tahun Berjalan)
Provinsi Maluku**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)					Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan				
			Target	Realisasi	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)	Tingkat Realisasi (%)	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Target	Realisasi	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)			
1	2	3	4		5		6			7		8=(7/6)*100	9		10=(5+7+9)	11=(10/4)*100		
2	Urusan wajib bukan pelayanan dasar																	
2	11	Bidang Lingkungan Hidup																
2	11	01	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100	
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	5	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	1	Dokumen	3	60	
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	234	Orang	38	Orang	42	Orang	100	42	Orang	122	52,14	
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	16	Orang	0	Orang	0	Orang	0	5	Orang	5	31,25	
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	60	
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	5	Paket	2	Paket	0	Paket	0	2	Paket	4	80	
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	5	Paket	1	Paket	1	Paket	100	1	Paket	3	60	
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	15	Paket	2	Paket	2	Paket	100	3	Paket	7	46,67	
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	10	Paket	2	Paket	2	Paket	100	2	Paket	6	60	
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	88	Laporan	14	Laporan	30	Laporan	100	25	Laporan	69	78,41	
2	11	01	1.06	0008	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	428	Laporan	79	Laporan	34	Laporan	91	347	Laporan	457	106,78	
2	11	01	1.07	Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah unit kendaraan dinas operasional atau lapangan yang disediakan	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	1	100	
2	11	01	1.07	0009	Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	1	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	1	100	
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	41	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0	
2	11	01	1.08	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	5	Laporan	1	Laporan	1	Laporan	100	1	Laporan	3	60	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/ Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)					Target program dan kegiatan ((Renja) Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100		
					6	7	6	7							
2 11 01 1.08 0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	60
2 11 01 1.08 0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	60	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	12	Laporan	100	12	Laporan	36	60
2 11 01 1.09	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	Nilai	B	Nilai	B	Nilai	N/A	Nilai	N/A	B	Nilai	B	100
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	20	Unit	3	Unit	4	Unit	3	Unit	75	4	Unit	10	50
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	97	Unit	35	Unit	25	Unit	24	Unit	96	19	Unit	78	80,41
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	5	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	1	Unit	1	20
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/ direhabilitasi	4	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 02 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0
2 11 02 1.02	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 02 1.02 0002	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	1	Dokumen	100	0	Dokumen	2	200
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 03 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	300
2 11 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	60
2 11 03 1.01 0004	Pengambilan Contoh Uji dan Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	12	Paket	0	Paket	0	Paket	0	Paket	0	0	Paket	0	0
2 11 03 1.02	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 03 1.02 0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	14	Titik	17	Titik	17	Titik	17	Titik	100	4	Titik	38	271,43

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)					Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			Target	Poin	Realisasi	Poin	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	Target	Poin	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
							Target	Poin	Realisasi	Poin					
1	2	3	4		5		6		7		9		10	11	
2 11 04	Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 04 1.01	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 04 1.01 0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	1	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	Dokumen	0	0
2 11 04 1.01 0009	Pengelolaan Taman Keanekaragaman Hayati Lainnya	Unit taman Kehati lainnya yang Dikelola Lingkup Kewenangan Provinsi	3	Unit	0	Unit	0	Unit	0	Unit	0	0	Unit	0	0
2 11 05	Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 05 1.01	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10
2 11 05 1.01 0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai	10	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	2	Dokumen	100	2	Dokumen	6	60
2 11 06	Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan (dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH))	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33,33	%	88,89	%	33,33	%	88,89	%	266,70	33,33	%	70,37	211,13
2 11 06 1.01	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100	%	130	%	100	%	190	%	190	100	%	100	100
		Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi	39	Izin	9	Izin	7	Izin	9	Izin	128,57	9	Izin	27	69,23
2 11 06 1.01 0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi	55	Dokumen	13	Dokumen	10	Dokumen	19	Dokumen	190,00	11	Dokumen	43	78,18
2 11 06 1.01 0003	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-Undangan di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	39	Badan Usaha	9	Badan Usaha	7	Badan Usaha	9	Badan Usaha	128,57	9	Badan Usaha	27	69,23
2 11 07	Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang Terkait dengan PPPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 07 1.01	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Air	73,43	Poin	55,87	Poin	50,25	Poin	56,55	Poin	112,54	72,63	Poin	61,68	84,00
		Indeks Kualitas Udara	88,83	Poin	92,47	Poin	87,50	Poin	92,42	Poin	105,62	88,03	Poin	90,97	102,41
		Indeks Kualitas Air Laut	82,21	Poin	81,88	Poin	79,63	Poin	78,08	Poin	98,05	81,99	Poin	80,65	98,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)		Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)					Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan	
			4	5	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Realisasi Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100		
					6	7	6	7							
2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	9	Dokumen	3	Dokumen	4	Dokumen	4	Dokumen	100	4	Dokumen	11	122,22
2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut	73,43 88,83 82,21	Poin Poin Poin	55,87 92,47 81,88	Poin Poin Poin	50,25 87,50 79,63	Poin Poin Poin	56,55 92,42 78,08	Poin Poin Poin	112,54 105,62 98,05	72,63 88,03 81,99	Poin Poin Poin	61,68 90,97 80,65	84,00 102,41 98,10
2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	6	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	2	Dokumen	2	33,33
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut	73,43 88,83 82,21	Poin Poin Poin	55,87 92,47 81,88	Poin Poin Poin	50,25 87,50 79,63	Poin Poin Poin	56,55 92,42 78,08	Poin Poin Poin	112,54 105,62 98,05	72,63 88,03 81,99	Poin Poin Poin	61,68 90,97 80,65	84,00 102,41 98,10
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	170	Orang	120	Orang	65	Orang	65	Orang	100	40	Orang	225	132,35
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 09 1.01	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut	73,43 88,83 82,21	Poin Poin Poin	55,87 92,47 81,88	Poin Poin Poin	50,25 87,50 79,63	Poin Poin Poin	56,55 92,42 78,08	Poin Poin Poin	112,54 105,62 98,05	72,63 88,03 81,99	Poin Poin Poin	61,68 90,97 80,65	84,00 102,41 98,10
2 11 09 1.01 0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	12	Entitas	8	Entitas	0	Entitas	0	Entitas	0	0	Entitas	8	66,67
2 11 10	Program Penanganan Pengaduan Liingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 10 1.01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut	73,43 88,83 82,21	Poin Poin Poin	55,87 92,47 81,88	Poin Poin Poin	50,25 87,50 79,63	Poin Poin Poin	56,55 92,42 78,08	Poin Poin Poin	112,54 105,62 98,05	72,63 88,03 81,99	Poin Poin Poin	61,68 90,97 80,65	84,00 102,41 98,10
2 11 10 1.01 0007	Pengelolaan Pengaduan permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi yang dikelola ditindaklanjuti/ditangani	10	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0	Pengaduan	0	2	Pengaduan	2	20
2 11 11	Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	83,10	Poin	78,75	Poin	77,16	Poin	78,59	Poin	101,85	82,43	Poin	79,92	96,18
2 11 11 1.01	Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut	73,43 88,83 82,21	Poin Poin Poin	55,87 92,47 81,88	Poin Poin Poin	50,25 87,50 79,63	Poin Poin Poin	56,55 92,42 78,08	Poin Poin Poin	112,54 105,62 98,05	72,63 88,03 81,99	Poin Poin Poin	61,68 90,97 80,65	84,00 102,41 98,10

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah Dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program (outcome)/Kegiatan (output)/Sub Kegiatan	Target Kinerja Capaian Program (Renstra Perangkat Daerah) Tahun 2025 - 2029		Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan s/d dengan tahun 2023 (n-3)			Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun 2024 (n-2)			Target program dan kegiatan ((Renja Perangkat Daerah tahun 2025 (n-1))		Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra Perangkat Daerah s/d tahun berjalan							
			5	Dokumen	0	Dokumen	Target Renja Perangkat Daerah tahun 2024 (n-2)		Tingkat Realisasi (%)	1	Dokumen	Realisasi Capaian Program dan Kegiatan s/d tahun 2025 (Tahun berjalan (tahun n-1))	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)							
							6	7						8=(7/6)*100	9	10=(5+7+9)	11=(10/4)*100			
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota		5	Dokumen	0	Dokumen	0	Dokumen	0	0	1	Dokumen	1	20

Dari Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja dan Pencapaian Renstra Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan Tahun 2025 lampiran Tabel 1 (Tabel T-C.29, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017), maka capaian target kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2024 diuraikan sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi

1.1. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

1.1.1. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 1 (satu) dokumen perencanaan perangkat daerah tersusun melalui hasil kegiatan Forum OPD Bidang Lingkungan Hidup.

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen (100%)

1.2. Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

1.2.1. Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 38 orang ASN Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dibayarkan gaji dan tunjangannya selama 14 bulan dalam tahun anggaran berjalan.

Target : 38 Orang/14 Bulan

Realisasi : 38 Orang/14 Bulan (100%)

1.3. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah

1.3.1. Sub Kegiatan Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 1 paket penyediaan alat – alat penerangan dan perlengkapan komponen listrik dengan rincian 30 pasang Bateray AAA, 40 buah Bateray Kalk. Uk. Kecil (ABC), 30 buah Bateray Segi Empat (Warles) (Nasional), 70 meter Kabel 2 x 1,5 m, 40 meter Kabel 2 x 4 m, 14 dos Kleem Kabel 10, 50 buah Lampu Philips 23 Watt, 50 buah Lampu Philips 24 Watt, 7 buah Stop Kontak Ardeuticom Arde 4.

Target : 1 Paket

Realisasi : 1 Paket (100%)

1.3.2. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan Rumah Tangga

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 1 paket penyediaan peralatan rumah tangga dengan rincian 1 buah Alat Pel Lantai, 12 buah Alat Pembersih Kaca, 20 pak Bagus Para Kanfer (180 Gram), 15 botol Densol, 3 buah Ember Anti Pecah (15 Liter), 3 buah Gayung Air, 20 buah Kain Lap (770 Gram), 300 buah Kantong Sampah (60x80 cm), 25 buah Pembersih Kaca (425 ml), 20 buah Pembersih Lantai (1600 ml), 24 buah Sabun Cuci Piring (910 ml), 6 kaleng Sabun Cuci Tangan (5 liter), 24 buah Sabut Spons, 8 buah Saju Ijuk, 50 buah Sapu Kebun, 100 pasang Sarung Tangan Kuning Panjang, 9 buah Sikat WC (Plastik), 30 kaleng Stella Kaleng (400 ml), 30 buah Stella Refill Matic, 15 buah Tempat Sampah (9 Liter), 130 roll Tissue Toilet Roll, 60 pak Tissue Wajah (900 Gr), 20 kaleng Yuri Porstex (1 Liter).

Target : 1 Paket

Realisasi : 1 Paket (100%)

1.3.3. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 2 paket penyediaan bahan logistik kantor dengan rincian 1 paket penyediaan alat tulis kantor berupa 11 dos Amplop Putih Panjang (110 x 230 cm), 8 dos Binder No. 111, 8 dos Binder No. 155, 8 dos Binder No. 200, 8 dos Binder No. 260, 30 buah Bolpoint Pilot G2-07, 8 buah Expedisi (100 lbr), 10 buah Hekter (Max/HD.50), 10 buah Hekter (Max/No.10), 5 kotak Isi Cutter L500, 10 dos Isi Hekter Besar, 10 dos Isi Hekter Kecil (Max/No.10 – IM), 8 buah Kas Agenda Keluar, 8 buah Kas Agenda Masuk, 5 Rim x 12 Bulan Kertas HVS Folio 70 Gram, 1 Rim x 3 Bulan Kertas HVS Folio Warna, 6 Rim x 12 Bulan Kertas HVS Kwarto 70 Gram, 15 buah Kwitansi Biasa Besar, 20 buah Kwitansi Proyek 3 TTD, 3 buah Lem Takol Besar, 30 buah Map Album 60, 200 buah Map Batik Kertas, 30 buah Map Plastik SN/JP (Jepit), 6 buah Mistar Plastik (30 Cm), 8 dos Paper Clip Bright Color, 9 dos Paper Kecil, 10 buah Pisau Cutter Besar, 10 pak Post-It 656, 10 buah Retype (Tip-Ex), 6 buah Stabilo Boss Original Clip, 4 botol Tinta Bantalan Cap Besar.

Selanjutnya 1 paket penyediaan Benda Pos berupa belanja Meterai 10.000 sebanyak 150 lembar serta 1 paket penyediaan bahan komputer berupa 30 buah DVD RW, 5 buah Flash Disk 64 GB, 1 unit Hardisk External HD 1 TB Seagate, 3 unit Mouse Wireless Microsoft, 2 buah Pulpen Pointer, 50 buah Tinta Printer Epson (Hitam), dan 60

buah Tinta Printer Epson (Warna).

Target : 2 Paket

Realisasi : 2 Paket (100%)

1.3.4. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 2 paket penyediaan barang cetakan dan penggandaan dengan rincian 1 paket penyediaan bahan cetak berupa 12 lembar Cetak Baliho ukuran 6 meter x 4 meter x 12 lembar, 150 lembar Cetak Bufallo Amplop Linen/Bufallo/Jeruk Resmi Standar dan 36 lembar Cetak Spanduk ukuran 4 meter x 1 meter. Selanjutnya 1 paket penyediaan bahan penggandaan berupa 18.200 lembar foto copy bahan/surat, 7.500 lembar foto copy DPA, 2.500 lembar foto copy LKIP dan Renstra, 6.000 lembar foto copy Laporan Keuangan, dan 7.500 lembar foto copy RKA.

Target : 2 Paket

Realisasi : 2 Paket (100%)

1.3.5. Sub Kegiatan Fasilitasi Kunjungan Tamu

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 30 laporan fasilitasi kunjungan tamu dengan rincian 15 laporan belanja makan konsumsi rapat biasa dengan jumlah orang yang diberikan konsumsi rapat sebanyak 54 orang per laporan serta 15 laporan belanja snack konsumsi rapat biasa dengan jumlah orang yang diberikan konsumsi sebanyak 54 orang per laporan.

Target : 30 Laporan

Realisasi : 30 Laporan (100%)

1.3.6. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 34 laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD dengan rincian 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Buru, 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Buru Selatan, 3 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Kepulauan Aru, 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Kepulauan Tanimbar, 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Maluku Barat Daya, 3 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Maluku Tengah, 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Maluku Tenggara, 3 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Seram Bagian Barat, 3 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Seram Bagian Timur, 1 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kota Tual, 3 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi serta Pertemuan Teknis Eselon III/Golongan IV Ke Unit Pusat di Jakarta dan Provinsi lainnya,

7 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi serta Pertemuan Teknis Eselon II Ke Unit Pusat di Jakarta dan Provinsi lainnya, 2 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi serta Pertemuan Teknis Pejabat Eselon IV/Golongan III Ke Unit Pusat di Jakarta dan Provinsi lainnya, 2 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi serta Pertemuan Teknis Pejabat Fungsional Keuangan Pusat dan Daerah/Golongan III Ke Unit Pusat di Jakarta dan Provinsi lainnya, dan 2 laporan Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi serta Pertemuan Teknis Pejabat Fungsional Perencanaan/Golongan III Ke Unit Pusat di Jakarta dan Provinsi lainnya.

Target : 34 Laporan

Realisasi : 31 Laporan (91,18%)

Permasalahan : Adanya belanja yang tidak terealisasi dalam sub kegiatan ini yaitu belanja Perjalanan Dinas Konsultasi dan Koordinasi Eselon II, PNS Golongan IV di Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Maluku Tenggara, dan Kota Tual dikarenakan selama tahun 2024 tidak ada agenda perjalanan dinas Pejabat Eselon II atau PNS Golongan IV ke 3 Kabupaten/Kota tersebut sehingga alokasi anggaran belanjanya tidak digunakan.

Solusi : Dinas akan mengoptimalkan perjalanan dinas ke setiap lokasi tujuan perjalanan dinas sesuai alokasi anggaran.

1.4. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.4.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 1 laporan penyediaan belanja paket pengiriman sebanyak 1 paket.

Target : 1 Paket

Realisasi : 0 Paket (0%)

Permasalahan : Belanja paket pengiriman tidak terealisasi karena selama tahun 2024 tidak adanya kebutuhan Dinas terhadap jasa pengiriman surat atau barang sehingga alokasi anggaran belanjanya tidak digunakan.

Solusi : Dinas akan memanfaatkan jasa pengiriman sesuai kebutuhan dan alokasi anggaran.

1.4.2. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 12 laporan (1 laporan per 12 bulan) penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik dengan rincian laporan penggunaan jasa pemasangan jaringan internet UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup, laporan pembayaran tagihan rekening listrik masing – masing untuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 1 unit selama 12 bulan dan untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 1 unit selama 12 bulan, laporan pembayaran tagihan rekening internet masing – masing untuk Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebanyak 1 unit selama 12 bulan dan untuk UPTD

Laboratorium Lingkungan Hidup sebanyak 2 unit selama 6 bulan, serta laporan pembuatan website Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan (100%)

Permasalahan : Belanja tagihan internet untuk UPTD Laboratorium Lingkungan Hidup tidak terealisasi sebanyak 6 bulan karena pemasangan jaringan internetnya dilaksanakan pada bulan Oktober sehingga pengenaan tagihan hanya selama 2 bulan terakhir di tahun 2024.

Solusi : Dinas akan melakukan realisasi belanja sesuai dengan Rencana Anggaran Kas sehingga tercapai realisasi alokasi anggaran.

1.4.3. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 12 laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor (1 laporan setiap 12 bulan) dengan rincian 12 laporan penyediaan jasa tenaga administrasi sebanyak 15 orang selama 12 bulan.

Target : 12 Laporan

Realisasi : 12 Laporan (100%)

1.5. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

1.5.1. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas

Jabatan

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 4 unit kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya dengan rincian yaitu penyediaan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk 2 unit kendaraan roda dua dan 1 unit kendaraan roda empat, serta penyediaan biaya pemeliharaan kendaraan dinas Pejabat Eselon II untuk 1 unit kendaraan roda empat.

Target : 4 Unit

Realisasi : 3 Unit (100%)

Permasalahan : Belanja penyediaan biaya pemeliharaan kendaraan dinas operasional untuk 1 unit kendaraan roda 2 tidak terealisasi dikarenakan kendaraan tidak dioperasikan.

Solusi : Dinas akan melakukan realisasi belanja sebagaimana rencana penggunaan anggaran dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran sehingga tercapai realisasi alokasi anggaran.

1.5.2. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 25 unit peralatan dan mesin kantor yang mendapat pemeliharaan. Adapun rincian penyediaan pemeliharaannya sebagai berikut pemeliharaan AC sebanyak 15 unit selama 4 kali dalam 1 tahun, pemeliharaan Komputer sebanyak 2 unit selama 1 kali dalam 1 tahun, pemeliharaan Laptop sebanyak 5 unit selama 1 kali dalam 1 tahun, dan pemeliharaan Printer sebanyak 2 unit selama 1 kali dalam 1 tahun.

Target : 25 Unit

Realisasi : 25 Unit (100%)

2. Program Perencanaan Lingkungan Hidup

2.1. Kegiatan Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Provinsi

2.1.1. Sub Kegiatan Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 1 dokumen KLHS RPJMD yang dibuat untuk menjadi acuan perencanaan pembangunan daerah.

Target : 1 Dokumen

Realisasi : 1 Dokumen (100%)

3. Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.1. Kegiatan Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan

Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara dan Laut

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media air dan laut dengan rincian 1 dokumen hasil pemantauan kualitas air sungai dan 1 dokumen hasil pemantauan kualitas air laut.

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen (100%)

3.1.2. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen hasil 1 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pengendalian emisi Gas Rumah Kaca, mitigasi dan adaptasi perubahan iklim dengan rincian 1 dokumen hasil Inventarisasi Emisi Gas Rumah Kaca dan 1 dokumen hasil identifikasi dan sosialisasi kampung iklim dalam rangka pelaksanaan kegiatan Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim.

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen (100%)

3.2. Kegiatan Penanggulangan Pencemaran dan / atau Kerusakan Lingkungan Hidup

3.2.1. Sub Kegiatan Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 17 titik sumber pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan.

Target : 17 Titik

Realisasi : 17 Titik (100%)

4. Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)

4.1. Kegiatan Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi

4.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 2 dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan dan/atau penimbunan dengan rincian 1 dokumen yang disampaikan kepada Pemerintah Pusat (Kementerian LHK RI) dan 1 dokumen yang disampaikan kepada Pemerintah Daerah (Gubernur Maluku).

Target : 2 Dokumen

Realisasi : 2 Dokumen (100%)

5. Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)

5.1. Kegiatan Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

5.1.1. Sub Kegiatan Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 10 dokumen rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan,

dan surat kelayakan operasi yang diberikan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku kepada pelaku usaha/kegiatan.

Target : 10 Dokumen

Realisasi : 19 Dokumen (190%)

5.1.2. Sub Kegiatan Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 7 laporan dari 7 pelaku usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi.

Target : 7 Laporan

Realisasi : 9 Laporan (128,57%)

6. Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1. Kegiatan Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH

6.1.1. Sub Kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait Dengan PPLH

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 4 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi

pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH dengan rincian masing – masing 1 dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan kearifan lokal atau pengetahuan tradisional terkait dengan PPLH di Desa Wamana Kabupaten Buru, Desa Tikbari Kabupaten Buru Selatan, Negeri Soya dan Negeri Latuhalat di Kota Ambon.

Target : 4 Dokumen

Realisasi : 4 Dokumen (100%)

7. Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat

7.1. Kegiatan Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi

7.1.1. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi

Target kinerja hasil atau keluaran sub kegiatan ini yaitu 65 orang yang merupakan anggota masyarakat/kelompok masyarakat yang diberikan Pelatihan terkait Pembentukan Bank Sampah dengan rincian 15 orang di Kabupaten Kepulauan Aru, 35 orang di Kabupaten Maluku Barat Daya, dan 15 orang di Kabupaten Seram Bagian Timur.

Target : 65 Orang

Realisasi : 65 Orang (100%)

2.2. Analisis Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Indikator Kinerja Utama (IKU) pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku mengacu pada uraian tugas pokok, fungsi dan struktur organisasi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagaimana diatur dalam Peraturan Gubernur Maluku Nomor 26 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Tugas dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Maluku sedangkan Indikator Kinerja Kunci (IKK) pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diampu mengacu pada Permendagri 18 Tahun 2020. Indikator – indikator kinerja pelayanan tersebut merupakan indikator yang mendukung capaian kinerja pembangunan daerah sehingga ditetapkan dalam dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Keberhasilan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sampai dengan tahun 2024 dapat terlihat dari pencapaian target indikator kinerja pelayanan. Hasil analisis kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dijabarkan pada Tabel 2 (Tabel. T-C.30 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini:

**Tabel 2. (Tabel T-C.30, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku**

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup			B (61,50 Poin)	B (61,50 Poin)	B (61,50 Poin)	B (61,50 Poin)	B (66,45 Poin)	B (63,10 Poin)	B (61,50 Poin)	B (61,50 Poin)	Nilai SAKIP Pemerintah Daerah Provinsi Maluku Tahun 2024 mengalami penurunan nilai dibandingkan dengan capaian Tahun 2023 meskipun masih berada dalam range nilai dengan kategori "Baik". Hal ini disebabkan oleh masih adanya sedikit perbaikan pada sistem manajemen kinerja serta komitmen pimpinan dalam manajemen kinerja.
2	Persentase Pengurangan Sampah			27%	28%	30%	11%	5,98%	3,68%	30%	30%	<p>Trend capaian persentase pengurangan sampah pada tahun 2023 - 2024 yang diharapkan dapat mencapai atau bahkan melampaui target tidak terealisasi. Hal ini disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Capaian target pengurangan sampah Provinsi Maluku pada tahun 2023 dan 2024 memiliki capaian yang sangat rendah. Hal ini disebabkan oleh kurang optimalnya peran fasilitas pengelolaan sampah seperti Bank Sampah Induk dan Unit serta TPS 3R. Selain itu, masih minimnya upaya pengurangan sampah di tingkat sumber oleh masyarakat seperti penggunaan Komposter dan LCO dalam rangka pengurangan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. 2. Belum optimalnya implementasi Kebijakan dan Strategi Daerah (Jakstrada) dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga di Provinsi Maluku sehingga masalah persampahan belum tertangani secara efisien dan efektif. 3. Masih belum terbentuknya Bank Sampah Induk serta masih terbatasnya keberadaan Bank Sampah Unit di beberapa Kabupaten/Kota sebagai salah satu fasilitas pengurangan sampah di Kabupaten/Kota. 4. Masih rendahnya antusias Dinas Lingkungan Hidup lingkup Kabupaten/Kota dalam pelaporan hasil pengurangan dan penanganan sampah kepada Kementerian Lingkungan Hidup Republik Indonesia melalui aplikasi Sistem Informasi Persampahan Nasional (SIPSN). 5. Perlu optimalisasi koordinasi antara Dinas Lingkungan Hidup Provinsi dengan Kabupaten/Kota dalam evaluasi pelaksanaan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												sehingga setiap permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kebijakan dapat ditanggulangi dengan berbagai rencana aksi perbaikan sehingga target pengurangan sampah di Provinsi Maluku dapat tercapai. permasalahan yang timbul selama pelaksanaan kebijakan dapat ditanggulangi dengan berbagai rencana aksi perbaikan sehingga target pengurangan sampah di Provinsi Maluku dapat tercapai.
3	Persentase Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca			23,40%	24,22%	25,22%	26,12%	68,65%	67,87%	85,82%	87,65%	Capaian target persentase penurunan emisi GRK Provinsi Maluku tahun 2024 hasil pelaporan tahun 2023 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya kenaikan kontribusi penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan yaitu sub sektor tutupan lahan. Kondisi tutupan lahan di Provinsi Maluku berdasarkan hasil interpretasi citra satelit mengalami peningkatan sehingga hal ini menjadi penyumbang penurunan emisi GRK dari sektor kehutanan.
4	Persentase Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan			100%	100%	100%	100%	128,57%	128,57%	100%	100%	Capaian target persentase pembinaan dan pengawasan izin lingkungan pada tahun 2023 dan 2024 melampaui target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh adanya peningkatan upaya pengawasan yang dilakukan bukan hanya dalam bentuk pengawasan secara langsung tapi juga pengawasan secara tidak langsung yaitu melalui evaluasi laporan implementasi izin lingkungan yang disampaikan oleh pelaku usaha/kegiatan setiap semester dalam setahun.
5	Tingkat Pencemaran Air Laut			78,97 Poin	79,63 Poin	81,99 Poin	82,05 Poin	81,88 Poin	78,08 Poin	81,99 Poin	82,05 Poin	Tingkat pencemaran air laut diindikasikan melalui nilai Indeks Kualitas Air Laut. Adapun kategori pencemaran air laut diatur dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2021. Realisasi target tingkat pencemaran air laut pada tahun 2024 tidak mencapai target yang ditetapkan. Hal ini disebabkan oleh nilai parameter wajib yang digunakan dalam perhitungan Indeks Kualitas Air Laut seperti Minyak dan Lemak serta Orto-Fosfat sebagaimana yang dipersyaratkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 berdasarkan hasil uji laboratorium melampaui baku mutu akibat pengaruh pembuangan air limbah dari darat ke laut yang merupakan hasil aktifitas beberapa lokasi pengambilan sampel.
			Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) Provinsi	76,87 Poin	77,16 Poin	82,43 Poin	82,60 Poin	78,75 Poin	78,71 Poin	82,43 Poin	82,60 Poin	Realisasi capaian IKLH tahun 2023 dan 2024 melampaui target IKLH tahun 2023 dan 2024 yang ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2019 - 2024. Hal ini disebabkan oleh perhitungan IKLH yang

No.	Indikator Kinerja sesuai Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	SPM/ Standar Nasional	IKK	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-		Proyeksi		Catatan Analisis
				2023	2024	2025	2026	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
												merupakan gabungan atau komposit beberapa nilai indeks yakni Indeks Kualitas Air, Indeks Kualitas Udara, Indeks Kualitas Lahan dan Indeks Kualitas Air Laut sehingga kenaikan atau penurunan salah satu nilai indeks akan mempengaruhi perhitungan IKLH. Untuk target IKLH Provinsi tahun 2025 dan 2026 terjadi peningkatan nilai dari tahun 2024 dikarenakan adanya perubahan perhitungan terhadap indeks komposit IKLH oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yaitu Indeks Kualitas Air (perhitungan menggunakan rumus baru sesuai <i>National Sanitation Foundation Water Quality Index/NSF-WQI</i>), Indeks Kualitas Udara (adanya penambahan parameter baru dalam perhitungan indeks kualitas udara yaitu <i>Particulate Matter 2,5 Mikron (PM.25)</i> dan Indeks Kualitas Lahan (semua kelas tutupan lahan/23 kelas tutupan lahan diperhitungkan dalam menentukan besarnya nilai indeks kualitas lahan).
			Persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33,33%	33,33%	33,33%	33,33%	88,89%	88,89%	50%	50%	Trend persentase ketaatan penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi pada tahun 2021 - 2022 yang diharapkan makin menurun berbanding terbalik dengan capaian target yang makin naik. Hal ini disebabkan oleh hal - hal sebagai berikut: 1. Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap kewajiban yang harus dipenuhi dalam dokumen lingkungan 2. Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap penyampaian laporan pelaksanaan dokumen lingkungan 3. Masih kurangnya ketaatan penanggungjawab usaha/kegiatan terhadap ketentuan teknis pengendalian pencemaran air, udara dan LB3 4. Belum dikenainya sanksi administratif terhadap pelaku usaha/kegiatan yang melakukan pelanggaran dikarenakan PPLHD yang ada di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku merupakan jabatan hasil penyetaraan serta belum memiliki sertifikat kompetensi PPLHD sehingga penjatuhan sanksi belum dapat dilakukan sesuai dengan kewenangan PPLHD

2.3. Isu – Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Berdasarkan tabel capaian kinerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku (Tabel 2) dapat terlihat tingkat keberhasilan setiap indikator pelayanan sesuai tugas dan fungsi pelayanan serta bidang urusan pemerintahan yang diampu oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Selain keberhasilan capaian target indikator kinerja pelayanan dinas, terdapat juga kegagalan capaian target indikator kinerja pelayanan dinas yang digambarkan oleh indikator kinerja pelayanan yang tidak mencapai target yaitu indikator kinerja "Persentase Pengurangan Sampah" dan indikator kinerja "Persentase Ketaatan Penanggung Jawab Usaha dan/atau Kegiatan terhadap Izin Lingkungan, Izin PPLH dan PUU LH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi". Penyebab kegagalan capaian target kedua indikator kinerja tersebut antara lain:

1. Masih belum terwujud sinergitas dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota serta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia selaku instansi pembina pusat sehingga tercipta kesenjangan kinerja dalam rangka pencapaian kinerja pembangunan.
2. Masih terdapat berbagai permasalahan yang menjadi hambatan dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku seperti minimnya alokasi APBD terhadap penyelenggaraan kinerja pelayanan dinas berdasarkan bidang urusan pemerintahan yang diampu meskipun permasalahan lingkungan hidup merupakan isu utama dalam penyelenggaraan pembangunan berkelanjutan. Selain itu, masih rendahnya kompetensi dan kurangnya jumlah sumber daya aparatur dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi dinas

sehingga diperlukan peningkatan kompetensi melalui keikutsertaan aparatur dalam berbagai kegiatan bimbingan teknis maupun pendidikan dan pelatihan bidang lingkungan hidup serta penambahan jumlah aparatur melalui proses seleksi Calon Aparatur Sipil Negara (CASN) oleh Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia berdasarkan analisis kebutuhan jabatan pada Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Sebagaimana penjabaran kinerja pembangunan daerah maupun nasional, maka capaian kinerja pelayanan dinas juga akan berpengaruh terhadap pencapaian visi dan misi Kepala Daerah bahkan capaian tujuan pembangunan nasional serta internasional seperti Tujuan Pembangunan Berkelanjutan atau *Sustainable Development Goals* (SDGs). Dengan demikian, perencanaan kinerja dinas harus diarahkan untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah, nasional maupun internasional sebagai wujud kolaborasi dan sinergitas dalam mensejahterakan kehidupan dunia.

Adapun yang menjadi tantangan yang dihadapi dan peluang yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam meningkatkan kinerja pelayanan berdasarkan hasil analisis capaian kinerja pelayanan dinas selama tahun 2023 sampai dengan tahun 2024 sebagai berikut:

1. Tantangan yang dihadapi dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku antara lain:
 - Koordinasi antar dan lintas sektoral;
 - Sinergitas program, kegiatan dan sub kegiatan dengan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku;
 - Peningkatan alokasi APBD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan dinas; dan

- Peningkatan kompetensi dan jumlah sumber daya aparatur dalam pelaksanaan teknis bidang lingkungan hidup.
2. Peluang dalam pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku antara lain:
 - Regulasi bidang lingkungan hidup;
 - Dukungan pemerintah daerah dan pusat serta *stakeholder* terkait dalam bentuk kebijakan dan pendanaan; dan
 - Keberadaan Laboratorium Lingkungan Hidup beserta sarana penunjangnya.

Berdasarkan penjabaran sebagaimana di atas, maka formulasi isu – isu penting yang teridentifikasi dari tingkat keberhasilan serta kegagalan penyelenggaraan tugas dan fungsi pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku meliputi:

1. Kurangnya pemahaman bahkan peran masyarakat serta stakeholder terkait dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup terkhususnya peningkatan kualitas lingkungan hidup dan perubahan iklim;
2. Rendahnya kompetensi serta kurangnya sumber daya aparatur dalam menunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas;
3. Masih kurangnya sarana dan prasarana penunjang penyelenggaraan tugas dan fungsi dinas;
4. Sistem basis data dan informasi lingkungan hidup belum optimal;
5. Lemahnya fungsi koordinasi dalam pengawasan implementasi izin atau pengelolaan lingkungan hidup oleh pelaku usaha/kegiatan.

Adapun beberapa hal yang perlu menjadi rekomendasi dalam perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah sebagai berikut:

- ✓ Program yang harus dilaksanakan adalah program yang berkontribusi dalam

capaian target kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku serta capaian target kinerja pembangunan daerah sebagaimana yang diamanatkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030.

- ✓ Memperhatikan penganggaran program dan kegiatan sesuai kebutuhan anggaran setiap sub kegiatan sehingga target indikator program dan kegiatan dapat tercapai dengan tetap memperhitungkan pengaruh faktor penghambat dan peluang capaian target.
- ✓ Nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan bidang urusan lingkungan hidup tahun 2026 agar sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 sehingga terwujud sinergitas kinerja antara perangkat daerah dengan pemerintah daerah dalam mendukung capaian kinerja pembangunan daerah.
- ✓ Sub Kegiatan dan kegiatan harus bersinergi dengan program sehingga target indikator kinerja program dapat tercapai.
- ✓ Output program, kegiatan dan sub kegiatan harus bersifat terukur sehingga memudahkan dalam pengukuran capaian kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.
- ✓ Output dan outcome program, kegiatan dan sub kegiatan agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat serta stakeholder baik secara materiil maupun immateriil.

2.4. Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Maluku tahun 2024 yang

memuat Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku tahun 2024 dalam pelaksanaannya sering tidak sesuai atau berbanding terbalik dengan apa yang direncanakan. Adapun beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya hal tersebut antara lain penganggaran serta berbagai kebijakan pemerintah yang mengakibatkan perubahan rencana kerja. Dalam penyusunan rencana kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 perlu dilakukan perbandingan terhadap kesesuaian rencana kerja dengan hasil analisis kebutuhan pada tahun 2024 sehingga perbaikan dan penyempurnaan perencanaan tahun 2026 dapat dilakukan dengan mempertimbangkan proses tersebut. Proses ini dijabarkan dalam Tabel 3 (Tabel T-C. 31 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

Tabel 3. (Tabel T-C.31, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Review terhadap Rancangan Awal RKPD tahun 2024
Provinsi Maluku

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	9.536.097.950	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH PROVINSI		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	6.241.769.051	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.1.	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	300.000.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	282.953.800	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.1.1.	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	300.000.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kabupaten Kepulauan Aru	Jumlah dokumen perencanaan perangkat daerah	1 Dokumen	282.953.800	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.2.	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	4.841.802.000	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	4.375.044.002	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.2.1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	42 Orang/Bulan	4.841.802.000	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	38 Orang/Bulan	4.375.044.002	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.3.	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	300.000.000	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
1.3.1.	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	D.K.I. Jakarta dan provinsi lainnya	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	6 Orang	300.000.000	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi	N/A	Jumlah pegawai berdasarkan tugas dan fungsi yang mengikuti pendidikan dan pelatihan	0 Orang	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
1.4.	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	2.599.424.900	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	639.021.949	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.4.1.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.460.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	1 Paket	11.460.200	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.4.2.	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	1.961.966.700	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	N/A	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	2 Paket	-	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
1.4.3.	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	24.295.800	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	1 Paket	38.290.116	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
1.4.4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	59.055.500	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	2 Paket	59.498.943	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.4.5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	51.730.200	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	2 Paket	58.884.390	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.4.6.	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	14 Laporan	42.007.000	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	30 Laporan	74.625.300	Kebutuhan anggaran dan target kinerja pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.4.7.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, Jakarta dan Provinsi lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	79 Laporan	448.909.700	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	11 Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku, Jakarta dan Provinsi lainnya	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	34 Laporan	396.263.000	Kebutuhan anggaran dan target kinerja pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.5.	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	853.239.400	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	796.911.200	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.5.1.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	3.000.000	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	1 Laporan	3.000.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan telah
1.5.2.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	297.350.000	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	12 Laporan	267.350.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.5.3.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	552.889.400	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	12 Laporan	526.561.200	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.6.	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	641.631.650	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	B	147.838.100	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.7.1.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	3 Unit	93.974.350	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	4 Unit	100.208.000	Kebutuhan anggaran dan target kinerja pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
1.7.2.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	35 Unit	47.657.300	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	25 Unit	47.630.100	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	1 Unit	500.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	N/A	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	0 Unit	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	2.250.000.000	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	499.999.726	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
2.1.	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	1.500.000.000	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin				Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin			
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin				Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin			
2.1.1.	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	1 Dokumen	1.500.000.000	Penyusunan dan Penetapan RPPLH Provinsi	N/A	Jumlah muatan hasil penyusunan dan penetapan RPPLH Provinsi yang disusun	0 Dokumen	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
2.2.	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	750.000.000	Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	499.999.726	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin				Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin			
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin				Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin			
2.2.1.	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Ambon	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	1 Dokumen	750.000.000	Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJPD/RPJMD	Kota Ambon	Jumlah dokumen KLHS RPJPD/RPJMD Provinsi yang disusun	1 Dokumen	499.999.726	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	1.288.048.900	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	374.999.467	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
3.1.	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	472.499.400	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	274.999.767	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin				Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin			
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin				Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin			
3.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2 Dokumen	209.999.400	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, dan Kabupaten Buru	Jumlah dokumen uji kualitas lingkungan hidup dilaksanakan terhadap media tanah, air, udara dan laut	2 Dokumen	150.000.000	Kebutuhan anggaran pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
3.1.2.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	11 Kabupaten/Kota se Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	262.500.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	2 Dokumen	124.999.767	Kebutuhan anggaran dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
3.2.	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	315.549.500	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	99.999.700	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin				Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin			
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin				Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin			

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
3.2.1.	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Kelurahan Waihaong, Kecamatan Nusaniwe, Kota Ambon	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	1 Laporan	105.552.200	Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	N/A	Jumlah laporan sosialisasi informasi pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup pada masyarakat lintas Kabupaten/Kota yang dilaksanakan	0 Laporan	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
3.2.2.	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	17 Titik	209.997.300	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Kabupaten Buru, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kabupaten Maluku Tengah	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	17 Titik	99.999.700	Kebutuhan anggaran dan target kinerja pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
3.3.	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	500.000.000	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
Indeks Kualitas Udara			87,50 Poin	Indeks Kualitas Udara				87,50 Poin			
Indeks Kualitas Air Laut			79,63 Poin	Indeks Kualitas Air Laut				79,63 Poin			
3.3.1.	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Kabupaten Maluku Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau kabupaten/kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	1 Dokumen	500.000.000	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	N/A	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi penghentian sumber pencemaran kewenangan pemerintah dan/atau kabupaten/kota dan/atau sektor lain hingga terhentinya sumber pencemaran yang dilaksanakan	0 Dokumen	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
4	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	192.854.700	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	130.000.078	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
4.1.	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	192.854.700	Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	130.000.078	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
Indeks Kualitas Udara			87,50 Poin	Indeks Kualitas Udara				87,50 Poin			
Indeks Kualitas Air Laut			79,63 Poin	Indeks Kualitas Air Laut				79,63 Poin			

No.	Rancangan Awal RKPД					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)
4.1.1.	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya	2 Dokumen	192.854.700	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan, dan/atau Penimbunan	Kabupaten Buru, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Timur, Kota Ambon	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya	2 Dokumen	130.000.078	Kebutuhan anggaran dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
5	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33,33%	747.434.900	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	33,33%	374.994.691	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
5.1.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	747.434.900	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	100%	374.994.691	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
			Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi	7 Izin				Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi	7 Izin		
5.1.1.	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen	350.000.000	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat, Kota Ambon	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	10 Dokumen	224.999.591	Kebutuhan anggaran dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
5.1.2.	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7 Laporan	397.434.900	Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah, Kabupaten Seram Bagian Barat	Jumlah laporan dari usaha dan/atau kegiatan yang diawasi izin lingkungan, persetujuan lingkungan, surat kelayakan operasi oleh Pemerintah Daerah Provinsi	7 Laporan	149.995.100	Kebutuhan anggaran dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
6	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	322.500.900	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	100.000.600	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
6.1.	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	122.500.900	Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	100.000.600	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPД dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
			Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin				Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin		
			Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin				Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin		

No.	Rancangan Awal RKPD					Hasil Analisis Kebutuhan					Catatan Penting	
	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Pagu Indikatif (Rp)	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Target Capaian	Kebutuhan Dana (Rp)		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	
6.1.1.	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	4 Dokumen	122.500.900	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kota Ambon, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	4 Dokumen	100.000.600	0	Pelaksanaan anggaran dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	200.000.000	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	0	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
Indeks Kualitas Udara			87,50 Poin	Indeks Kualitas Udara				87,50 Poin				
Indeks Kualitas Air Laut			79,63 Poin	Indeks Kualitas Air Laut				79,63 Poin				
	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Kabupaten Seram Bagian Barat dan Kabupaten Maluku Tengah	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	2 Dokumen	200.000.000	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	N/A	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	0 Dokumen	0	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
7	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	384.623.200	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	554.997.938	0	Kebutuhan anggaran pelaksanaan program antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
7.1.	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	384.623.200	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	554.997.938	0	Kebutuhan anggaran pelaksanaan kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin	Indeks Kualitas Udara				87,50 Poin				
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin	Indeks Kualitas Air Laut				79,63 Poin				
7.1.1.	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Maluku Barat Daya dan Kota Ambon	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	120 Orang	384.623.200	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Barat Daya, Kabupaten Seram Bagian Timur	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	65 Orang	554.997.938	0	Kebutuhan anggaran, target kinerja dan lokasi pelaksanaan sub kegiatan antara rancangan awal RKPD dengan hasil analisis kebutuhan berbeda
8	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	150.986.000	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	77,16 Poin	0	0	Pelaksanaan program ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai
8.1.	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	150.986.000	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi		Indeks Kualitas Air	50,25 Poin	0	0	Pelaksanaan kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD
		Indeks Kualitas Udara	87,50 Poin	Indeks Kualitas Udara				87,50 Poin				
		Indeks Kualitas Air Laut	79,63 Poin	Indeks Kualitas Air Laut				79,63 Poin				
8.1.1.	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Kota Ambon, Kabupaten Maluku Tengah dan Kabupaten Seram Bagian Timur	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	4 Entitas	150.986.000	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/ Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	-	Jumlah masyarakat/ lembaga masyarakat/ dunia usaha/dunia pendidikan/ filantropi yang dinilai kinerjanya dalam rangka PPLH	0 Entitas	0	0	Pelaksanaan sub kegiatan ini tidak diakomodir dalam hasil analisis kebutuhan namun direncanakan dalam rancangan awal RKPD sesuai kebutuhan OPD

2.5. Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Kegiatan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Tahun 2025 yang telah diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku secara daring melalui aplikasi Zoom Meeting sebagaimana amanat Permendagri 86 Tahun 2017 dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku, Pusat Pengendalian Lingkungan Hidup Sulawesi dan Maluku dan para pemangku kepentingan (*stakeholder*) terkait bidang lingkungan hidup dimanfaatkan sebagai wadah penampungan dan penjaringan aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku. Hal ini menunjukkan pendekatan perencanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku menggunakan sistem perencanaan dari bawah ke atas (*bottom up planning*) berdasarkan asas demokratisasi dan desentralisasi.

Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Tahun 2025 merupakan wahana antar pihak – pihak yang langsung atau tidak langsung mendapatkan manfaat atau dampak dari pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai perwujudan dari pendekatan partisipatif perencanaan pembangunan daerah. Tujuan pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Tahun 2025 adalah:

- 1) Menyelaraskan program, kegiatan dan sub kegiatan antara Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dengan Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku berdasarkan usulan program, kegiatan dan sub kegiatan hasil Musyawarah Rencana Pembangunan Kabupaten/Kota untuk menyempurnakan rancangan

Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 dan sebagai bahan pemutakhiran rancangan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026;

- 2) Menyelaraskan indikator serta target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan kewenangan dalam rangka sinergitas perwujudan prioritas pembangunan daerah dan nasional;
- 3) Menyelaraskan penganggaran program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas berdasarkan pagu indikatif untuk Dinas Lingkungan Hidup Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Usulan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan pada isu – isu penting penyelenggaraan tugas dan fungsi sesuai urusan pemerintahan bidang lingkungan hidup yang diampu merupakan hasil dari pelaksanaan Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Tahun 2025 yang diakomodir dalam Berita Acara Kesepakatan Hasil Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup se-Provinsi Maluku Tahun 2025. Usulan tersebut dijabarkan dalam Tabel 4 (Tabel T-C. 32 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) sebagai berikut:

**Tabel 4. (Tabel T-C.32, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026
Provinsi Maluku**

Nama Perangkat Daerah : Dinas Lingkungan Hidup

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1	Program Pembinaan dan Pengawasan terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)				
1.1.	Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi				
1.1.1	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	11 Dokumen	Sub Kegiatan Ini perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk melakukan pendampingan pembinaan dan pengendalian lingkungan hidup kepada penanggungjawab usaha/kegiatan serta peningkatan kapasitas Komisi Amdal di instansi lingkungan hidup lingkup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku
1.1.2	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah Badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	11 Badan Usaha	Sub Kegiatan ini perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk melakukan penguatan kegiatan pengawasan terkait ketaatan izin/persetujuan lingkungan kepada setiap penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2024.

No.	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Lokasi	Indikator Kinerja	Besaran/Volume	Catatan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Program Pengelolaan Persampahan				
2.1.	Penanganan Sampah di TPA/ TPST Regional				
2.1.1	Koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota	11 Dokumen	Sub Kegiatan ini perlu dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku untuk mengkoordinir pelaksanaan pengelolaan sampah di Kabupaten/Kota oleh Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota lingkup Provinsi Maluku sehingga target kinerja pengelolaan sampah dapat tercapai guna mendukung kelestarian lingkungan

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN RENJA PERANGKAT DAERAH

3.1. Telaahan terhadap Kebijakan Nasional

Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia (PPN/Bappenas RI) telah menetapkan Tema RKP Tahun 2026 “**Kedaulatan Pangan dan Energi, serta Ekonomi yang Produktif dan Inklusif**” melalui Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2025 tentang Rancangan Rencana Kerja Pemerintah Tahun 2026. Tema tersebut merupakan penjabaran dari tema RPJMN 2025 – 2029 “Bersama Indonesia Maju, Menuju Indonesia Emas 2045”. RKP Tahun 2026 merupakan perencanaan tahun kedua dalam pelaksanaan RPJMN 2025-2029 yang memberikan penekanan pada dua kata kunci utama, yaitu pangan dan energi serta ekonomi yang produktif dan inklusif yang masing – masing didukung oleh Prioritas Nasional.

RKP Tahun 2026 akan menjadi dokumen perencanaan pada masa transisi antara RPJPN 2005 – 2025 dengan RPJPN 2025 – 2045, sekaligus penjabaran awal dari Rancangan Undang – Undang (RUU) RPJPN 2025 – 2045 dan RPJMN Teknokratik 2025 – 2029 sebagai Tahap Pertama Pembangunan 5 Tahunan.

RKP Tahun 2026 disusun dengan tujuan untuk menjadi acuan dalam perencanaan, penganggaran, dan pelaksanaan pembangunan, baik oleh pemerintah pusat maupun daerah. Bagi pemerintah pusat RKP digunakan sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Kementerian/Lembaga, yang selanjutnya akan dituangkan dalam RUU APBN. Bagi Pemerintah Daerah, RKP Tahun 2026 digunakan sebagai acuan untuk menyusun

RKPD Tahun 2026. Sedangkan bagi perangkat daerah RKP Tahun 2026 digunakan sebagai acuan untuk mensinergikan Renja Perangkat Daerah Tahun 2026 dalam rangka mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan nasional.

Tema RKP Tahun 2026 sebagaimana dimaksud diwujudkan melalui arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan. Pembangunan nasional yang inklusif dan berkelanjutan menjadi prioritas utama dalam mewujudkan visi RPJMN Tahun 2025 – 2029. Untuk mencapai tujuan ini, pada tahun 2026 pemerintah menegaskan komitmennya dalam mengarusutamakan berbagai aspek pembangunan yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat dan kelestarian lingkungan.

Pengarusutamaan pembangunan meliputi:

1. Integrasi Perspektif Gender dan Inklusi Sosial;
2. Integrasi Pembangunan Berkelanjutan (SDGs);
3. Akselerasi Transformasi Digital; dan
4. Pembangunan Rendah Karbon dan Berketahanan Iklim.

Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku sebagai pengampu urusan pemerintahan daerah bidang lingkungan hidup di Provinsi Maluku turut berperan dalam mewujudkan arah kebijakan pengarusutamaan pembangunan nomor 4 (empat). Dengan demikian, arah kebijakan serta perumusan program, kegiatan dan sub kegiatan Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku akan disinergikan dengan arah kebijakan pengarusutamaan dimaksud dalam rangka mendukung capaian tujuan dan sasaran pembangunan nasional.

3.2. Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 disusun

dengan mengacu pada Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 yaitu **“Penguatan Ketahanan Pangan, Energi, serta Ekonomi Produktif dan Inklusif”** serta Misi RPJMD Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2030 nomor 5 (lima) yaitu **”Pengelolaan Lingkungan Kawasan Pesisir dan Pulau – Pulau Kecil, Sumber Daya Alam yang Berkelanjutan, Adaptasi dan Mitigasi Dampak Perubahan Iklim dan Ketahanan Bencana (Etis, Responsif dan Akuntabel)”**. Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 bertujuan untuk:

1. Mewujudkan peningkatan kualitas lingkungan hidup di Provinsi Maluku; serta
2. Mewujudkan peningkatan akuntabilitas kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Sedangkan sasaran Renja Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 adalah:

1. Tercapainya peningkatan kualitas lingkungan hidup berbasis ketahanan iklim dan bencana; serta
2. Terwujudnya birokrasi yang bersih dan akuntabel, efektif dan efisien, serta memiliki pelayanan publik berkualitas melalui penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan serta penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik di Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku.

Tujuan dan sasaran Renja ini telah diselaraskan dengan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029 sebagai perwujudan sinergitas perencanaan perangkat daerah.

3.3. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan

Dalam rangka mendukung perwujudan tema Rencana Kerja Pembangunan Daerah

(RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 yang dijabarkan dalam prioritas pembangunan daerah, maka Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku pada Tahun 2026 dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-3406 Tahun 2024 yang mengatur tentang nomenklatur Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Perangkat Daerah berdasarkan bidang urusan merencanakan 11 (sebelas) program, 19 (sembilan belas) kegiatan dan 32 (tiga puluh dua) sub kegiatan. Lokasi pelaksanaan sub kegiatan di tahun 2026 tersebar di 11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku serta beberapa provinsi lainnya sesuai kebutuhan. Alokasi anggaran yang dibutuhkan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dalam pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun 2026 berjumlah Rp. 9.033.358.585,- serta prakiraan maju tahun 2027 berjumlah Rp. 8.145.822.500,-.

BAB IV

RENCANA KERJA DAN PENDANAAN

DINAS LINGKUNGAN HIDUP PROVINSI MALUKU

Rencana Kerja dan Pendanaan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 diarahkan untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran sebagaimana telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 – 2029, serta mendukung Prioritas Pembangunan sebagaimana tertuang dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026. Untuk merealisasikan rencana kerja dinas diperlukan alokasi pendanaan yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dalam bentuk Dana Alokasi Umum (DAU) atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) dalam bentuk Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dan Non-Fisik, Dana Tugas Pembantuan dan Dana Dekonsentrasi. Rumusan rencana program, kegiatan dan sub kegiatan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 dan prakiraan maju tahun 2027 dijabarkan dalam Tabel 5 (Tabel T-C. 33 sesuai Permendagri 86 Tahun 2017) berikut ini.

**Tabel 4. (Tabel T-C.33, Lampiran Permendagri 86 Tahun 2017)
RUMUSAN RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN PERANGKAT DAERAH TAHUN 2026
DAN PRAKIRAAN MAJU TAHUN 2027
PROVINSI MALUKU**

Nama SKPD : Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027				
			Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
DINAS LINGKUNGAN HIDUP					9.033.358.585				7.937.822.500			
2	URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR				9.033.358.585				7.937.822.500			
2	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG LINGKUNGAN HIDUP				9.033.358.585				7.937.822.500			
2	11	01		Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	6.691.439.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	6.751.097.000
2	11	01	1.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	100.000.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	100.000.000
2	11	01	1.01	0001 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah dokumen perencanaan Perangkat Daerah	Kota Ambon	1 Dokumen	100.000.000	APBD	-	1 Dokumen	100.000.000
2	11	01	1.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	5.547.000.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	5.550.000.000
2	11	01	1.02	0001 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah orang yang menerima gaji dan tunjangan ASN	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	48 Orang/Bulan	5.547.000.000	APBD	-	48 Orang/Bulan	5.550.000.000
2	11	01	1.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	60.650.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	70.525.000
2	11	01	1.05	0009 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai berdasarkan Tugas dan Fungsi	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	D.K.I. Jakarta dan Provinsi lainnya	3 Orang	60.650.000	APBD	-	3 Orang	70.525.000
2	11	01	1.06	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	282.501.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	294.284.000
2	11	01	1.06	0001 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah paket komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Paket	5.000.000	APBD	-	1 Paket	5.280.000

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
							Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1					2	3	4	5	6	7	8	9	10
2	11	01	1.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah paket peralatan dan perlengkapan kantor yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Paket	50.000.000	APBD	-	1 Paket	53.000.000
2	11	01	1.06	0003	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah paket peralatan rumah tangga yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Paket	35.000.000	APBD	-	1 Paket	35.000.000
2	11	01	1.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah paket bahan logistik kantor yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	3 Paket	50.000.000	APBD	-	3 Paket	52.000.000
2	11	01	1.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah paket barang cetakan dan penggandaan yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	2 Paket	22.501.000	APBD	-	2 Paket	25.004.000
2	11	01	1.06	0008	Fasilitasi Kunjungan Tamu	Jumlah laporan fasilitasi kunjungan tamu	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	14 Laporan	20.000.000	APBD	-	14 Laporan	20.000.000
2	11	01	1.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah laporan penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD	11 Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku serta D.K.I. Jakarta dan Provinsi lainnya	20 Laporan	100.000.000	APBD	-	20 Laporan	104.000.000
2	11	01	1.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	100.000.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	100.000.000
2	11	01	1.07	0011	Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah unit sarana dan prasarana pendukung gedung kantor atau bangunan lainnya yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	8 Unit	100.000.000	APBD	-	8 Unit	100.000.000
2	11	01	1.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	393.000.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	403.000.000
2	11	01	1.08	0001	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah laporan penyediaan jasa surat menyurat	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	1 Laporan	1.000.000	APBD	-	1 Laporan	1.000.000
2	11	01	1.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah laporan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Laporan	242.000.000	APBD	-	12 Laporan	252.000.000
2	11	01	1.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah laporan penyediaan jasa pelayanan umum kantor yang disediakan	Kantor Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku	12 Laporan	150.000.000	APBD	-	12 Laporan	150.000.000
2	11	01	1.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan	Nilai SAKIP Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku		B (61,70 Poin)	208.288.000	APBD	-	B (61,80 Poin)	233.288.000

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 01 1.09 0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas jabatan yang dipelihara dan dibayarkan pajaknya	Kota Ambon	4 Unit	140.288.000	APBD	-	4 Unit	140.288.000
2 11 01 1.09 0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah peralatan dan mesin lainnya yang dipelihara	Kota Ambon	18 Unit	13.000.000	APBD	-	18 Unit	13.000.000
2 11 01 1.09 0008	Pemeliharaan Aset Tak Berwujud	Jumlah aset tak berwujud yang dipelihara	Kota Ambon	1 Unit	5.000.000	APBD	-	1 Unit	5.000.000
2 11 01 1.09 0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah gedung kantor dan bangunan lainnya yang dipelihara/direhabilitasi	Kota Ambon	1 Unit	50.000.000	APBD	-	1 Unit	75.000.000
2 11 02	Program Perencanaan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	1.000.000.000	APBD	-	82,76 Poin	-
2 11 02 1.01	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Provinsi	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	1.000.000.000	APBD	-	73,03 Poin	-
		Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
		Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2 11 02 1.01 0004	Penyusunan RPPLH Provinsi	Jumlah dokumen RPPLH di Provinsi yang berisi arahan/muatan RPPLH Provinsi dan Kabupaten/Kota yang lintas administrasi	Kota Ambon	1 Dokumen	1.000.000.000	APBD	-	0 Dokumen	-
2 11 03	Program Pengendalian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	215.000.000	APBD	-	82,76 Poin	223.396.000
2 11 03 1.01	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	160.000.000	APBD	-	73,03 Poin	170.000.000
		Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
		Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2 11 03 1.01 0002	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi inventarisasi GRK dari sektor lingkungan hidup yang dilaksanakan	Kab. Maluku Tengah dan Kab. SBB	2 Dokumen	80.000.000	APBD	-	2 Dokumen	85.000.000
2 11 03 1.01 0004	Pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan	Jumlah pengambilan contoh uji dan pengujian parameter kualitas lingkungan yang dilaksanakan	Kab. Maluku Tengah, Kab. SBB dan Kab. Buru	3 Paket	80.000.000			3 Paket	85.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	03	1.02		Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut		72,83 Poin 88,23 Poin 82,05 Poin	55.000.000	APBD	-	73,03 Poin 88,43 Poin 82,10 Poin	53.396.000
2	11	03	1.02	0003	Penghentian Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup	Jumlah sumber pencemar dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang dihentikan	Kota Ambon	2 Titik	55.000.000	APBD	-	2 Titik	53.396.000
2	11	04			Program Pengelolaan Keanekaragaman Hayati (Kehati)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	200.000.000	APBD	-	82,76 Poin	-
2	11	04	1.01		Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Provinsi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut		72,83 Poin 88,23 Poin 82,05 Poin	200.000.000	APBD	-	73,03 Poin 88,43 Poin 82,10 Poin	-
2	11	04	1.01	0001	Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	Jumlah dokumen rencana induk pengelolaan Kehati yang disusun	Kota Ambon	1 Dokumen	200.000.000	APBD	-	0 Dokumen	-
2	11	05			Program Pengendalian Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (Limbah B3)	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	80.000.000	APBD	-	82,76 Poin	83.124.000
2	11	05	1.01		Pengumpulan Limbah B3 Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (Satu) Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air Indeks Kualitas Udara Indeks Kualitas Air Laut		72,83 Poin 88,23 Poin 82,05 Poin	80.000.000	APBD	-	73,03 Poin 88,43 Poin 82,10 Poin	83.124.000
2	11	05	1.01	0002	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengelolaan Limbah B3 dengan Pemerintah Pusat dalam rangka Pengangkutan, Pemanfaatan, Pengolahan dan/atau Penimbunan	Jumlah dokumen hasil koordinasi dan sinkronisasi pengelolaan limbah B3 dengan pemerintah dalam rangka pengangkutan, pemanfaatan, pengolahan, dan/atau penimbunan yang bukan kewenangan provinsi serta pelaksanaan pengumpulan limbah B3 lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi yang sesuai kewenangannya	Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah	2 Dokumen	80.000.000	APBD	-	2 Dokumen	83.124.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1				2	3	4	5	6	7	8	9	10	
2	11	06			Program Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Izin Lingkungan dan Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH)	Persentase ketaatan penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan terhadap izin lingkungan, izin PPLH dan PUU LH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		33,33%	366.919.585	APBD	-	33,33%	381.248.500
2	11	06	1.01		Pembinaan dan Pengawasan Izin Lingkungan dan Izin PPLH yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi	Persentase izin lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi		100%	366.919.585	APBD	-	100%	381.248.500
					Jumlah izin lingkungan yang dibina dan diawasi		7 Izin					7 Izin	
2	11	06	1.01	0001	Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah rekomendasi dan/atau persetujuan teknis, persetujuan lingkungan, dan surat kelayakan operasi yang diberikan	Kab. Buru, Kab. Buru Selatan, Kab. SBB, Kab. Malteng	11 Dokumen	200.000.000	APBD	-	11 Dokumen	200.000.000
2	11	06	1.01	0006	Pengawasan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah terkait Persetujuan Lingkungan yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dan Peraturan Perundang-undangan di bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah badan usaha dan/atau kegiatan yang diawasi		7 Badan Usaha	166.919.585	APBD	-	7 Badan Usaha	181.248.500
2	11	07			Program Pengakuan Keberadaan Masyarakat Hukum Adat (MHA), Kearifan Lokal dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	115.000.000	APBD	-	82,76 Poin	119.491.000
2	11	07	1.01		Pengakuan MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	60.000.000	APBD	-	73,03 Poin	60.000.000
						Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
						Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
2 11 07 1.01 0001	Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi, penyediaan data dan informasi pengakuan keberadaan MHA kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak kearifan lokal atau pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH	Kota Ambon	1 Dokumen	60.000.000	APBD	-	1 Dokumen	60.000.000
2 11 07 1.02	Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang terkait dengan PPLH	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	55.000.000	APBD	-	73,03 Poin	59.491.000
		Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
		Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2 11 07 1.02 0001	Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH	Jumlah dokumen kelembagaan MHA, kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan hak MHA terkait dengan PPLH yang dilakukan pemberdayaan, kemitraan, pendampingan dan penguatan	Kab. Maluku Tengah dan Kota Ambon	1 Dokumen	55.000.000		-	1 Dokumen	59.491.000
2 11 08	Program Peningkatan Pendidikan, Pelatihan dan Penyuluhan Lingkungan Hidup Untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	100.000.000	APBD	-	82,76 Poin	103.900.000
2 11 08 1.01	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	100.000.000	APBD	-	73,03 Poin	103.900.000
		Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
		Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2 11 08 1.01 0003	Penyelenggaraan Penyuluhan dan Kampanye Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Jumlah masyarakat/ kelompok masyarakat/ pelaku usaha/ kegiatan yang terlibat	Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah dan Kab. SBB	30 Orang	100.000.000	APBD	-	30 Orang	103.900.000
2 11 09	Program Penghargaan Lingkungan Hidup untuk Masyarakat	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	150.000.000	APBD	-	82,76 Poin	156.000.000

Kode				Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027		
						Lokasi (Kab./Kota)	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10				
2	11	09	1.01		Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Provinsi	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	150.000.000	APBD	-	73,03 Poin	156.000.000
						Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
						Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2	11	09	1.01	0001	Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/ Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah masyarakat/lembaga masyarakat/dunia usaha/ dunia pendidikan/filantropi yang dinilai kerjanya dalam rangka PPLH	Kota Ambon, Kab. Maluku Tengah dan Kab. SBB	3 Entitas	150.000.000	APBD	-	3 Entitas	156.000.000
2	11	10			Program Penanganan Pengaduan Lingkungan Hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	35.000.000	APBD	-	82,76 Poin	36.366.000
2	11	10	1.01		Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Provinsi	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	35.000.000	APBD	-	73,03 Poin	36.366.000
						Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
						Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2	11	10	1.01	0007	Pengelolaan Pengaduan Permasalahan Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup Tingkat Provinsi	Jumlah pengaduan permasalahan pencemaran dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Ambon dan Kab. SBB	2 Pengaduan	35.000.000	APBD	-	2 Pengaduan	36.366.000
2	11	11			Program Pengelolaan Persampahan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup		82,60 Poin	80.000.000	APBD	-	82,76 Poin	83.200.000
2	11	11	1.01		Penanganan Sampah di TPA/TPST Regional	Indeks Kualitas Air		72,83 Poin	80.000.000	APBD	-	73,03 Poin	83.200.000
						Indeks Kualitas Udara		88,23 Poin				88,43 Poin	
						Indeks Kualitas Air Laut		82,05 Poin				82,10 Poin	
2	11	11	1.01	0014	Koordinasi, Sinkronisasi dan Pemantauan Pelaksanaan Pengelolaan Sampah di Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen hasil koordinasi, sinkronisasi dan pemantauan pelaksanaan pengelolaan sampah di kabupaten/kota dan perusakan lingkungan hidup tingkat provinsi yang ditindaklanjuti/ditangani	Kota Ambon dan Kab. Maluku Tengah	1 Dokumen	80.000.000	APBD	-	1 Dokumen	83.200.000

BAB V
PENUTUP

Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 ini dimulai dengan proses koordinasi dan sinkronisasi pada Rapat Koordinasi Bidang Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2025 yang diselenggarakan oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku dengan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota se-Provinsi Maluku, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Maluku serta stakeholder lainnya.

Renja ini akan dijadikan sebagai acuan penyempurnaan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Maluku Tahun 2026 dengan demikian keberhasilan pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah direncanakan pada akhirnya sangat tergantung pada alokasi anggaran dan etos kerja yang tinggi serta komitmen seluruh penyelenggara pemerintahan pada jajaran Dinas Lingkungan Hidup di Provinsi Maluku sesuai dengan tugas pokok dan fungsi masing – masing.

Demikian penyusunan dokumen Rencana Kerja (Renja) Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Maluku Tahun 2026 kami buat dengan harapan dapat mengakomodir berbagai upaya pelestarian lingkungan dan penanggulangan permasalahan lingkungan yang terjadi saat ini serta dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan kepada para pengambil kebijakan dalam perencanaan pembangunan. Sekian dan terima kasih.

Ambon, 2025
Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Provinsi Maluku



Drs. ROY CORNELES SIAUTA, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 196607081998031003